



Nexus Ecotheology Curriculum Standards Policy: A Strategic Solution to Overcome Epistemological Fragmentation of Education at IAIN Pontianak

Kebijakan Standar Kurikulum Nexus Ekoteologi: Solusi Strategis Mengatasi Fragmentasi Epistemologis Pendidikan di IAIN Pontianak

Noviansyah

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Alamat Email Korrespondensi: noviansyah@iainptk.ac.id

Article History	Received (February 7 th , 2026)	Revised (March 15 th , 2026)	Accepted (April 14 th , 2026)
-----------------	---	--	---

News Article

Keyword:

*Curriculum;
Ecotheology
Nexus;
Epistemological
Fragmentation;
Policy;
IAIN Pontianak.*

Abstract

West Kalimantan, as the epicenter of the world's lungs, continues to face the threat of massive environmental degradation, yet Islamic education at IAIN Pontianak remains trapped in a textual-sky paradigm that is sterile from ecological issues. The focus of this study is to formulate a curriculum reorientation through the Ecotheological Nexus standards to address epistemological fragmentation. The main gap is found in the sharp separation between theological doctrine and natural responsibility, where the curriculum exists dichotomously and anthropocentrically. Specific issues examined include the dominance of sectoral egos of scientific disciplines and the absence of integrative instruments in the curriculum, courses, and Semester Learning Plans (RPS). This study is urgent to maintain the institution's relevance amidst the global climate crisis. Using a descriptive qualitative approach with a case study design, this policy study makes IAIN Pontianak's curriculum documents the primary object of study through document analysis instruments. The results show that scientific fragmentation causes students to experience "ecological blindness" despite having a strong normative understanding. The main findings emphasize that integration can only occur through mandated regulatory intervention. In conclusion, the lack of operational standards is a major obstacle to the unification of science and religion. The strategic recommendation addressed to policy makers is to immediately ratify the Chancellor's Decree on the Nexus Ecotheology Curriculum Standards as a mandatory legal umbrella for integrating environmental issues across all study programs substantially.

Kata Kunci:

*Kurikulum;
Nexus
Ekoteologi;
Fragmentasi
Epistemologis;*

Abstrak

Kalimantan Barat, sebagai episentrum paru-paru dunia, terus menghadapi ancaman degradasi lingkungan masif, namun pendidikan Islam di IAIN Pontianak masih terjebak dalam paradigma tekstual-langit yang steril dari isu ekologi. Fokus kajian ini adalah merumuskan reorientasi kurikulum melalui standar Nexus Ekoteologi guna mengatasi fragmentasi epistemologis. Gap utama

Kebijakan; IAIN
Pontianak;

ditemukan pada pemisahan tajam antara doktrin teologi dengan tanggung jawab alamiah, di mana kurikulum eksis secara dikotomis dan antroposentris. Masalah spesifik yang dikaji meliputi dominasi ego sektoral disiplin ilmu dan ketiadaan instrumen integratif dalam kurikulum, matakuliah dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Kajian ini menjadi mendesak demi menjaga relevansi institusi di tengah krisis iklim global. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, kajian ini menjadikan dokumen kurikulum IAIN Pontianak sebagai objek kajian utama melalui instrumen analisis dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa fragmentasi keilmuan menyebabkan mahasiswa mengalami "kebutaan ekologis" meski memiliki pemahaman normatif yang kuat. Temuan utama menegaskan bahwa integrasi hanya dapat terjadi melalui intervensi regulasi yang bersifat mandat. Kesimpulannya, ketiadaan standar operasional menjadi penghambat utama penyatuan sains dan agama. Rekomendasi strategis yang ditujukan kepada pembuat kebijakan adalah segera mengesahkan Keputusan Rektor tentang Standar Kurikulum Nexus Ekoteologi sebagai payung hukum wajib untuk mengintegrasikan isu lingkungan di seluruh program studi secara substansial.

To cite this article: Noviansyah. (2026). "Nexus Ecotheology Curriculum Standards Policy: A Strategic Solution to Overcome Epistemological Fragmentation of Education at IAIN Pontianak". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(3), January-June. Page: 2103 – 2120.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

IAIN Pontianak secara geografis menempati Kalimantan yang merupakan bagian jantung dari wilayah yang dijuluki "paru-paru dunia" (Nurhalim, 2025). Eksistensi IAIN Pontianak sebagai Perguruan Tinggi Islam tak hanya bertanggung jawab sebagai institusi ilmiah dan moral dan peningkatan pengetahuan namun lebih mulia dari itu mencetak kader kepemimpinan perubahan yang peduli terhadap persoalan lingkungan (Musyafa et al., 2025). Keberadaannya di bentangan alam Kalimantan Barat yang kaya namun rentan terhadap eksploitasi, menuntut institusi ini untuk tidak sekadar berdiam diri di dalam ruang kelas yang steril dari isu lingkungan. Kampus seharusnya menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya pejuang ekologi yang mampu membaca ayat-ayat Tuhan tidak hanya dalam kitab suci, tetapi juga pada setiap jengkal hutan dan aliran sungai yang kini tengah terancam oleh krisis iklim yang kian masif. Dikatakan Marianus bahwa kampus merupakan lingkungan belajar juga sangat menentukan terbentuknya budaya ekologis, karena kampus memiliki berbagai regulasi dan program lingkungan berkelanjutan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam proses belajar, berpartisipasi, dan menumbuhkan kepekaan ekologis secara natural (Teti, 2025).

Visi ekologis perguruan tinggi termasuk Perguruan Tinggi Islam menuntut adanya pergeseran paradigma dari pengajaran yang bersifat antroposentris (pandangan yang menempatkan manusia sebagai kunci utama pemanfaatan ekologi) menuju spiritualitas ekosentrisme yang membumi dan inklusif terhadap alam akan memberikan banyak solusi atas masalah lingkungan yang dihadapi (Sukarsono, 2014) dan (Jannah, 2025).

IAIN Pontianak memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor etika lingkungan. Etika lingkungan dapat dibentuk dengan mengintegrasikan nilai-nilai tauhid, *khalifah* dan

mizan sebagai dasar perlindungan ekosistem lokal atau sebagai kerangka teoekologi Islam (Mudin, 2025). Tanpa adanya keberanian untuk menyentuh realitas sosial-ekologis di sekitarnya, institusi ini dikhawatirkan akan kehilangan relevansinya dan hanya menjadi penonton di tengah laju deforestasi sebagai dampak dari alih fungsi lahan, ekspansi masif perkebunan kelapa sawit penebangan liar. Menurut data Hari Prayoga sebagai akademisi Universitas Tanjungpura dalam harian Suarakalbar menyatakan bahwa luas hutan Kalbar sejak tahun 2000 seluas 13 jt hektar hingga tahun 2022 hanya tinggal 4,9 jt hektar yang berarti dalam kurun waktu 22 tahun Kalbar telah kehilangan 8 juta hektar atau 61% (Redaksi Suarakalbar, 2025). Tak berhenti pada musibah ekologi tersebut, lemahnya kontrol pemerintah sehingga menyebabkan suburnya pertambangan ilegal oleh warga negara asing kian memperparah kondisi alam Kalbar yang berdampak merugikan negara sebesar 957,26 miliar (BPK RI, 2024) dan tentu masih banyak bentuk bencana ekologis lainnya yang belum terekspose.

Asa IAIN Pontianak sebagai pusat kajian borneo akan lebih berkarakter jika menjadinya institusi ini sebagai laboratorium etika lingkungan. Setidaknya, menjadikan kampus sebagai laboratorium etika lingkungan berarti menuntut para akademisi untuk keluar dari zona nyaman teks-teks klasik menuju ijihad ekologis atau ijihad kontemporer yang nyata (Maimun, 2025). Untuk itu, pilar Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) harus pula dibangun agar mampu memberikan perlindungan bagi martabat alam sebagai manifestasi dari keimanan yang sejati. Ketika agama dipahami sebagai kekuatan konservasi ekologi, maka IAIN Pontianak bukan lagi sekadar lembaga pendidikan biasa, melainkan garda terdepan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian ciptaan Tuhan demi masa depan generasi mendatang. Oleh karena itu, penguatan visi ekologis ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kemestian yang harus segera diwujudkan melalui langkah-langkah strategis di level kebijakan kurikuler. Sadiyah dalam risetnya mengisyaratkan kurikulum muatan lokal berbasis ekologi telah dimulai pada jenjang sekolah menengah pertama (Sadiyah, 2026). Bahkan, level perguruan tinggi, UIN KHAS turut telah memulai pengembangan kurikulum bermuatan ekoteologi (Webpage UIN Khas, 2025). Spirit ini harus dapat direspon secara cepat oleh IAIN Pontianak guna membuktikan bahwa intelektualitas Islam sangat kompatibel dengan gerakan penyelamatan planet bumi melalui literasi ekologi yang kuat. Dengan menyatukan kecerdasan spiritual dan kesadaran lingkungan, kampus ini akan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya saleh secara ritual, namun juga saleh secara sosial-ekologis, membawa rahmat bagi seluruh alam sesuai amanah risalah Islam. Selaras dengan pandangan Hannani dkk, bahwa institusi pendidikan semestinya mencetak lulusan yang arif spiritualitas, lembut dalam cinta terhadap lingkungan dan sesama (Hannani, 2025).

Realitas pendidikan Islam di IAIN Pontianak saat ini masih terjebak dalam sekat-sekat pemikiran yang memisahkan antara kesalehan ritual dan kepedulian pada alam semesta. Fakta ini dikuatkan dengan kurikulum *Outcomes Based Education* (OBE) yang berlaku di Program Studi belum memiliki muatan ekoteologi. Kesenjangan epistemologis ini menciptakan jarak yang lebar antara narasi teologis di ruang kelas dengan jeritan ekologis di tanah Kalimantan yang kian terkoyak oleh eksploitasi. Selama ini, ajaran agama seringkali diposisikan dalam ruang-ruang sakral yang steril, seolah-olah urusan langit tidak memiliki sangkut paut dengan urusan bumi. Akibatnya, pemahaman mahasiswa tentang Islam cenderung berhenti pada tataran normatif tanpa mampu menyentuh esensi perlindungan lingkungan hidup yang menjadi bagian integral dari misi risalah Islam. Pernyataan ini dikuatkan Amrizarois, bahkan dalam banyak agama

dan kepercayaan sekalipun, kontemplasi, *tadabbur* terhadap alam turut menjadi bagian ibadah yang menguatkan relasi manusia Tuhan dan alam (Ismail, 2023).

Pengajaran agama yang bersifat tekstual cenderung memfokuskan seluruh energi akademiknya pada pemaknaan literatur klasik secara kaku tanpa melihat konteks zaman yang telah berubah. Situasi ini Balkis dkk dibutuhkan pendekatan interpretatif dinamis serta lebih kontekstual agar pendidikan dan pengajaran agama lebih *meaningful*, memiliki ruh dan mampu menjawab tantangan zaman (Najihah, Bannan, 2025). Ketika krisis alam seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta deforestasi terjadi secara masif, dunia akademik justru sering memandangnya sebagai isu sekuler yang bersifat teknis semata. Pandangan dikotomis ini sangat berbahaya karena melepaskan tanggung jawab iman dari kerusakan ekosistem yang terjadi tepat di depan mata para civitas akademika. Tanpa adanya jembatan penghubung antara dalil dan realitas, agama kehilangan taringnya sebagai kompas etika dalam menghadapi keserakahan manusia terhadap alam Kalimantan Barat.

Pemisahan ini berakar pada pola pikir yang menganggap bahwa ibadah hanya terjadi di atas sajadah, sementara menjaga kelestarian sungai atau hutan dianggap sebagai tugas praktisi lingkungan semata. Padahal, setiap ayat yang diturunkan seharusnya menjadi inspirasi bagi manusia untuk menjalankan peran penjagaan bumi yang harmonis dan berkelanjutan. Melalui landasan narasi Islam, alquran Al-A'raf: 56 "*Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya*". Ayat ini mengisyaratkan bahwa alam sejak awal tercipta dalam kondisi baik, teratur dan seimbang serta tugas manusia menjaga tatanan kosmik tersebut bukan mendestruksi (Najihah, Bannan, 2025). Institusi pendidikan Islam harus segera menyadari bahwa pengabaian terhadap isu-isu ekologi dalam kurikulum adalah sebuah kegagalan epistemologis yang sangat fatal bagi masa depan bangsa. Bannan dkk, dalam Ekoteologi Islam Konsepsi dan Implementasi menguatkan pernyataan bahwa integrasi ekologi, isu perubahan iklim dalam kurikulum perguruan tinggi Islam mendesak dan diperlukan guna mencetak imam berwawasan iklim dan lingkungan guna mengkatalisasi kesadaran kolektif guna mendorong terwujudnya kebijakan publik mendukung kesejahteraan (Najihah, Bannan, 2025). Jika krisis ini terus dibiarkan tanpa adanya integrasi keilmuan, maka lulusan yang dihasilkan akan mengalami "kebutaan ekologis" meskipun mereka menguasai berbagai teks-teks keagamaan yang sangat mendalam secara teoretis.

Oleh sebab itu, perlunya ijtihad baru untuk meruntuhkan tembok pemisah antara pengetahuan keagamaan dan realitas empiris lingkungan hidup menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Rekonstruksi kurikulum harus diarahkan pada model pembelajaran yang interkonektif, di mana isu-isu lokal Kalimantan Barat menjadi laboratorium hidup bagi pendalaman nilai-nilai teologi. Hanya dengan menyatukan kembali ajaran langit dengan realitas bumi, IAIN Pontianak dapat melahirkan intelektual muslim yang responsif terhadap penderitaan ekologis masyarakat sekitar. Keberhasilan dalam menjembatani kesenjangan epistemologis ini akan menentukan sejauh mana kontribusi nyata kampus dalam menjaga keberlangsungan kehidupan di wilayah jantung khatulistiwa ini.

Reorientasi kurikulum di IAIN Pontianak bukanlah sekadar tren akademik semata, melainkan respons darurat terhadap jeritan ekosistem Kalimantan Barat yang kian mengkhawatirkan. Sebagai institusi yang berpijak di atas tanah khatulistiwa, kampus ini tidak boleh lagi menjadi menara gading yang mengabaikan kepulan asap karhutla atau hilangnya keanekaragaman hayati di sekitarnya. Sekarang adalah waktu yang paling krusial bagi dunia pendidikan Islam untuk membuktikan bahwa iman memiliki daya transformatif dalam menjawab krisis ekologi yang terjadi secara nyata. Jika kebijakan

pendidikan tidak segera berpihak pada kelestarian alam, maka kita sedang mewariskan pengetahuan yang mandul bagi generasi mendatang di tengah kehancuran lingkungan yang masif.

Krisis ekologi lokal yang terjadi saat ini menuntut ijhtihad kolektif dari seluruh civitas akademika untuk menghadirkan solusi yang melampaui batas-batas teks formal. Keterlambatan dalam melakukan reorientasi kurikulum hanya akan memperlebar jarak antara nilai-nilai luhur agama dengan kenyataan pahit kerusakan hutan gambut yang menjadi penyangga kehidupan. IAIN Pontianak harus mampu menerjemahkan teologi menjadi aksi nyata yang menyentuh akar permasalahan masyarakat lokal yang kehilangan ruang hidup akibat eksploitasi alam. Melalui perubahan kurikulum yang responsif, setiap mata kuliah akan memiliki nyawa ekologis yang mampu menggerakkan kesadaran mahasiswa untuk menjadi pelindung alam yang tangguh di wilayahnya sendiri.

Dinamika zaman yang kian cepat menuntut perguruan tinggi keagamaan untuk melahirkan profil lulusan yang tidak hanya fasih bicara dalil, tetapi juga cakap dalam memitigasi bencana lingkungan. Kontekstualisasi kurikulum menjadi jembatan yang akan menghubungkan kecerdasan spiritual dengan kemaslahatan publik dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang rapuh. Tanpa langkah berani untuk melakukan perombakan besar-besaran, institusi ini dikhawatirkan akan kehilangan peran strategisnya sebagai kompas moral bagi pembangunan daerah. Reorientasi ini menjadi pintu masuk bagi lahirnya gerakan intelektual baru yang mampu menyatukan kearifan lokal dengan nilai-nilai universal Islam demi menyelamatkan masa depan lingkungan Kalimantan Barat.

Akhirnya, momentum transformasi ini harus dipandang sebagai amanah suci untuk menjaga martabat kemanusiaan melalui penjagaan alam semesta yang berkelanjutan. Setiap kebijakan yang diambil hari ini akan menjadi catatan sejarah tentang sejauh mana IAIN Pontianak peduli terhadap krisis keberlanjutan yang mengancam planet ini. Penundaan terhadap reorientasi kurikulum hanya akan memperparah kerentanan sosial dan lingkungan yang berdampak langsung pada kesejahteraan umat manusia. Dengan keberanian untuk berubah sekarang juga, kampus ini akan bertransformasi menjadi pusat keunggulan ekoteologi yang memberikan inspirasi bagi gerakan penyelamatan lingkungan secara global dari jantung Kalimantan

Identifikasi Masalah

Berdasarkan langkah-langkah sistematis dalam penggalian masalah maka kajian kebijakan telah menghasilkan identifikasi masalah mendasar berdasarkan isu kajian yang diangkat. Berikut tiga masalah yang teridentifikasi, antara lain;

1. Fragmentasi epistemologis dalam kurikulum pendidikan dan pengajaran di IAIN Pontianak

Masalah utama terletak pada dikotomi pendidikan yang memisahkan antara ilmu tauhid (teologi) dengan ilmu alam (ekologi) dalam kurikulum di IAIN Pontianak. Kurikulum yang ada cenderung bersifat antroposentris, di mana pembahasan keagamaan lebih terfokus pada hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan antarmanusia (*hablum minannas*), sementara hubungan manusia dengan alam (*hablum minal 'alam*) hanya menjadi materi pelengkap. Rendahnya integrasi ini menyebabkan mahasiswa kehilangan landasan etika teologis saat berhadapan dengan isu kerusakan lingkungan. Tanpa adanya kebijakan integrasi kurikulum yang mewajibkan muatan ekoteologi, institusi gagal

melahirkan lulusan yang memiliki kesadaran ekospiritual dalam menjawab tantangan perubahan iklim di Kalimantan Barat (*sumber data: Dokumen Kurikulum OBE (Outcomes Based Education) Program Studi yang berlaku di IAIN Pontianak Tahun 2025*)

2. Hilangnya kontribusi intelektual IAIN Pontianak bagi keselamatan lingkungan di Kalimantan Barat

Rendahnya peran akademik dalam mengatasi krisis lingkungan dipicu oleh pola riset yang masih bersifat sektoral dan kurangnya minat dosen dalam mengeksplorasi penelitian transdisipliner. Di IAIN Pontianak, riset-riset keagamaan sering kali berhenti pada tataran normatif-tekstual tanpa menyentuh realitas ekologis Kalimantan Barat, seperti dampak pertambangan atau deforestasi terhadap masyarakat lokal. Ketiadaan strategi kebijakan penelitian yang memprioritaskan kajian ekoteologi membuat luaran akademik (jurnal dan buku) tidak mampu memberikan solusi praktis bagi pengambil kebijakan di daerah. Krisis lingkungan membutuhkan pendekatan ijthad baru dalam bentuk riset aksi yang menggabungkan teks suci dengan data saintifik lingkungan (*Sumber data: Dokumen SK Rektor IAIN Pontianak No. 237 Tahun 2022, SK Rektor No. 438 Tahun 2023 dan SK Rektor No. 459 tentang Penerima Bantuan Penelitian Penerima Bantuan Kegiatan Penelitian BOPTN pada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*)

3. Disfungsi pengabdian masyarakat berbasis transformasi ekologis di kalangan dosen peneliti IAIN Pontianak

Pilar pengabdian masyarakat di IAIN Pontianak masih terjebak pada format seremonial dan belum menyentuh transformasi kesadaran ekologis yang berkelanjutan. Program-program pengabdian sering kali mengabaikan potensi rumah ibadah atau lembaga pendidikan Islam sebagai pusat edukasi lingkungan. Padahal, melalui doktrin ekoteologi, perguruan tinggi memiliki modal sosial yang kuat untuk menggerakkan masyarakat melalui narasi keagamaan yang pro-alam. Kelemahan kebijakan pada pilar ini mengakibatkan tidak adanya model pemberdayaan masyarakat yang mampu mengonversi nilai spiritual menjadi aksi konservasi nyata, sehingga institusi kehilangan momentum untuk menjadi agen perubahan dalam menghadapi ancaman degradasi lingkungan di tingkat tapak. (*sumber data: SK Rektor IAIN Pontianak Tahun 2024 Tentang Penerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset*)

Analisis Berdasarkan Metode USG

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian dilakukan analisis menggunakan metode analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Fragmentasi Epistemologis dalam Kurikulum Pendidikan dan Pengajaran di IAIN Pontianak Sangat urgen, karena kurikulum adalah fondasi pembentukan paradigma mahasiswa. Jika tidak diubah sekarang, setiap tahun kampus melahirkan lulusan yang	5	5	4	14

	<p>buta terhadap krisis ekologi. Tingkat keseriusannya sangat tinggi karena berdampak sangat fatal karena menciptakan dikotomi antara iman dan amal terhadap alam. Pertumbuhannya jika dibiarkan, pola pikir antroposentris akan mengakar dan menjadi budaya akademik yang sulit diubah di masa depan.</p>				
2	<p>Hilangnya kontribusi intelektual IAIN Pontianak bagi keselamatan lingkungan di Kalimantan Barat Tingkat urgensi, mendesak karena Kalimantan Barat sedang menghadapi krisis lingkungan nyata (karhutla, tambang) yang membutuhkan solusi saintifik-teologis segera. Tingkat keseriusan masalah, cukup serius jika tanpa riset, IAIN hanya akan menjadi penonton dalam perdebatan isu lingkungan global. Pertumbuhan masalah sangat tinggi, semakin lama riset diabaikan, gap antara data lapangan dan kebijakan kampus akan semakin lebar.</p>	4	4	5	13
3	<p>Disfungsi Pengabdian Masyarakat Berbasis Transformasi Ekologis di kalangan dosen peneliti IAIN Pontianak Tingkat urgensi, cukup mendesak, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan kurikulum dan hasil riset (Masalah 1 dan 2). Tingkat keseriusan, cukup serius karena menyangkut citra institusi di mata masyarakat, namun dampaknya lebih bersifat eksternal. Pertumbuhan masalah ini cenderung stabil, namun akan memburuk jika tidak ada model pengabdian yang berbasis pada nilai keagamaan yang kuat.</p>	3	4	4	11

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, maka masalah kebijakan nomor 1 (**Fragmentasi Epistemologis dalam Kurikulum Pendidikan dan Pengajaran di IAIN Pontianak**) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (14), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani. Dengan demikian adapun akar masalah “**Fragmentasi Epistemologis dalam Kurikulum Pendidikan dan Pengajaran di IAIN Pontianak**” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Fishbone

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi *problem statement* yang di-*highlight* pada artikel kebijakan ini bahwa kenyamanan dalam zona aman spesialisasi menyebabkan budaya akademik “*ego disiplin keilmuan*” yang mengakar sehingga terjadi fragmentasi epistemologis dalam kurikulum pendidikan dan pengajaran di IAIN Pontianak.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Mengeliminasi Dikotomi Epistemologis, bertujuan untuk meruntuhkan tembok pemisah antara ilmu agama (*qauliyah*) dan ilmu alam (*kauniyah*) dalam struktur kurikulum, sehingga tercipta sintesis keilmuan yang utuh dan tidak terfragmentasi.
2. Merumuskan Standar Operasional Integrasi menghasilkan draf regulasi yang konkret dalam bentuk instrumen RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang mewajibkan setiap mata kuliah memuat keterkaitan fungsional dengan isu ekologi.
3. Meningkatkan Relevansi Institusional, memastikan bahwa kurikulum IAIN Pontianak tetap adaptif dan responsif terhadap krisis ekologi lokal di Kalimantan Barat, sehingga institusi tidak menjadi "menara gading" yang terasing dari problem masyarakat.
4. Membangun Budaya Akademik Transdisipliner, mendorong terjadinya dialog lintas disiplin ilmu di kalangan dosen, sehingga isu lingkungan tidak lagi dianggap sebagai beban satu prodi saja, melainkan tanggung jawab intelektual kolektif.
5. Standardisasi Mutu Lulusan Berwawasan Lingkungan, menetapkan parameter keberhasilan pendidikan yang tidak hanya mengukur kecerdasan kognitif-agamais, tetapi juga kesadaran dan kecakapan mahasiswa dalam melakukan aksi pelestarian alam.

Manfaat Kajian:

1. Bagi Pengambil Kebijakan Rektorat, menyediakan basis data dan argumen akademis yang kuat untuk melegitimasi lahirnya Keputusan Rektor tentang Standar Kurikulum Nexus Ekoteologi sebagai payung hukum transformasi kampus.
2. Bagi Unit Penjaminan Mutu (LPM), memberikan kerangka kerja (*framework*) yang jelas untuk melakukan audit dan evaluasi kurikulum prodi, sehingga proses akreditasi internal memiliki indikator integrasi yang terukur.
3. Bagi dosen, memberikan panduan metodologis dalam mengembangkan materi ajar yang kreatif, di mana dalil-dalil agama dapat dikontekstualisasikan secara langsung dengan fenomena empiris lingkungan hidup.
4. Bagi mahasiswa, memperluas cakrawala intelektual sehingga mahasiswa memiliki kompetensi ganda: pemahaman keislaman yang mendalam sekaligus literasi ekologi yang tajam untuk bekal pengabdian di masyarakat.
5. Bagi masyarakat dan lingkungan, secara jangka panjang, kebijakan ini bermanfaat dalam menciptakan agen-agen perubahan (*agent of change*) yang mampu memitigasi kerusakan lingkungan di Kalimantan Barat melalui pendekatan nilai-nilai spiritual Islam.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Keranga Teoritjs

1. Teori integrasi-interkoneksi

Teori integrasi-interkoneksi yang dikembangkan Amin Abdullah sebagai *grand theory* dalam analisa kajian kebijakan ini. Teori ini memandang bahwa krisis peradaban, termasuk krisis ekologi, berakar pada isolasi antar-disiplin ilmu yang menyebabkan "kebutaan" terhadap realitas kompleks. Dalam konteks IAIN Pontianak, teori ini mengidentifikasi bahwa fragmentasi epistemologis terjadi karena ilmu agama dipisahkan secara kaku dari ilmu alam, sehingga teks suci kehilangan relevansi praktisnya. Sebagai alat identifikasi, teori ini menunjukkan bahwa penyebab utama krisis kurikulum adalah ego-sektoral akademik yang memandang alam sebagai objek profan yang terpisah dari wilayah sakral agama. Konsekuensinya, pendidikan hanya melahirkan intelektual yang cerdas secara dogmatis namun gagap dalam menghadapi kehancuran ekosistem lokal. Oleh karena itu, alternatif solusi yang ditawarkan adalah perombakan paradigma kurikulum dari pola "independen" menjadi "interkonektif" yang saling menyapa.

2. Teori ekoteologi Islam

Teori ekoteologi yang menjadi teori Seyyed Hossein Nasr dijadikan *middle theory* dalam analisa kajian kebijakan ini. Teori ini menjadi jembatan prinsip teologi dengan etika lingkungan melalui konsep kesatuan alam semesta (*Unity of Creation*) yang menolak pemahaman antroposentrisme radikal. Melalui teori ini, ditemukan faktor penyebab masalah berupa hilangnya kesadaran spiritual atas alam, di mana manusia merasa sebagai penguasa mutlak, bukan sebagai khalifah yang bertanggung jawab. Teori ini membantu mengidentifikasi bahwa kegagalan kurikulum saat ini terletak pada keringnya dimensi spiritual dalam memandang krisis iklim sebagai krisis iman. Konsekuensinya adalah degradasi lingkungan yang masif di Kalimantan Barat dianggap sebagai masalah teknis belaka, bukan tanggung jawab moral keagamaan. Solusi yang dirumuskan adalah menginternalisasi nilai-nilai ketuhanan ke dalam kebijakan kurikulum agar mahasiswa memiliki empati ekologis yang berakar pada doktrin Islam.

3. Teori analisis kebijakan

Teori William N. Dunn digunakan sebagai teori aplikatif dalam kajian kebijakan ini. Teori ini digunakan untuk mentransformasikan gagasan filosofis menjadi instrumen manajerial yang terukur melalui siklus analisis kebijakan yang sistematis. Dalam kajian ini, teori Dunn mengidentifikasi bahwa faktor penyebab stagnasi kurikulum adalah ketiadaan standar operasional yang bersifat mandat dan mengikat secara hukum. Melalui analisis alternatif, teori ini mengevaluasi berbagai instrumen kebijakan dan menyimpulkan bahwa hanya intervensi regulatif yang mampu memutus rantai fragmentasi keilmuan. Konsekuensi dari pengabaian teori aplikatif ini adalah rekomendasi akademik yang hanya berakhir di atas kertas tanpa adanya implementasi nyata di tingkat program studi. Solusi konkret yang ditawarkan adalah penetapan Keputusan Rektor sebagai instrumen legal untuk mewajibkan integrasi Nexus Ekoteologi dalam setiap komponen rencana pembelajaran.

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, maka sintesa atas kajian kebijakan berupa langkah strategis menyatukan paradigma integrasi-interkoneksi sebagai landasan filosofis, ekoteologi sebagai ruh substansi kurikulum, dan analisis kebijakan Dunn sebagai alat eksekusi strategis. Ketiga teori ini secara koheren membuktikan bahwa penyelesaian fragmentasi epistemologis di IAIN Pontianak memerlukan perpaduan antara kesadaran intelektual, komitmen spiritual, dan ketegasan regulasi. Transformasi kurikulum bukan sekadar perubahan dokumen, melainkan perwujudan ijtihad kebijakan untuk menjaga martabat manusia dan kelestarian alam secara simultan.

Kerangka Konseptual

Definisi konsep yang menjadi kunci kajian ini mengintegrasikan tiga konsep fundamental: *pertama*, *nexus ekoteologi* sebagai titik temu antara doktrin ketuhanan dan konservasi alam, *kedua*, fragmentasi epistemologis sebagai kondisi keterpisahan ilmu agama dari realitas ekosistem dan *ketiga*, reorientasi kurikulum sebagai tindakan korektif terhadap struktur pengajaran. *Nexus ekoteologi* didefinisikan bukan sekadar materi tambahan, melainkan lensa metodologis yang menyatukan nilai *maqasid al-shariah* dengan keberlanjutan lingkungan (Mangunjaya & McKay, 2012). Fragmentasi epistemologis diidentifikasi sebagai hambatan struktural yang menyebabkan ajaran agama bersifat pasif dan tidak responsif terhadap krisis iklim lokal. Sementara itu, reorientasi kurikulum merupakan instrumen kebijakan untuk mengubah paradigma sempit akademik dari antroposentrisme menuju teosentrisme ramah lingkungan.

Hubungan kausalitas dalam kerangka kajian ini bermula dari permasalahan terjadinya fragmentasi epistemologis sebagai akar penyebab (*root cause*) dari ketidakberdayaan institusi dalam merespons krisis ekologi di Kalimantan Barat. Ketika ilmu agama dan sains lingkungan berjalan sendiri-sendiri, maka kebijakan pendidikan akan gagal menghasilkan aksi nyata bagi pelestarian alam (Huda et al., 2020). Untuk memutus mata rantai masalah ini, konsep *nexus ekoteologi* hadir sebagai jembatan integratif yang merekatkan kembali kedua disiplin tersebut dalam satu wadah kurikulum. Secara logis, reorientasi kurikulum menjadi motor penggerak yang mentransformasikan gagasan *nexus* tersebut menjadi standar operasional yang wajib dipatuhi oleh seluruh program studi. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem akademik yang koheren, di mana nilai spiritual dan kompetensi ekologis berpadu dalam profil lulusan yang utuh.

Model pemikiran dalam kajian ini menggunakan alur *input-process-output-outcome* untuk menginterpretasikan data kebijakan secara sistematis. Pada tahap *input*, data berupa dokumen kurikulum, matakuliah dan RPS dianalisis untuk mendeteksi tingkat fragmentasi keilmuan menggunakan kriteria integrasi Amin Abdullah (2014). Tahap *Process* melibatkan analisis strategis untuk merumuskan intervensi regulatif berupa Keputusan Rektor (jika perubahan kurikulum secara makro) dan Keputusan Dekan (jika perubahan bersifat penambahan muatan bahan kajian ekotologi) sebagai mandat perubahan. Tahap *output* berfokus pada terciptanya standar kurikulum baru yang memuat indikator ekologis di setiap mata kuliah. Akhirnya, tahap *outcome* memandu interpretasi data mengenai kesiapan institusi dalam mencetak kader pejuang lingkungan yang memiliki landasan teologis kuat. Model ini memastikan bahwa interpretasi data tidak hanya berhenti pada deskripsi masalah, tetapi berujung pada solusi kebijakan yang terukur dan aplikatif.

METODOLOGI

Pendekatan dan desain kajian kebijakan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal yang bersifat instrumenal. Pendekatan ini dipilih karena isu fragmentasi epistemologis dan reorientasi kurikulum memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks institusional dan tekstual yang tidak dapat dijangkau oleh angka statistik. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk membedah secara spesifik bagaimana struktur kurikulum di IAIN Pontianak merespons krisis ekologi lokal. Dengan fokus pada "bagaimana" dan "mengapa" kebijakan kurikulum saat ini belum mampu menjawab tantangan lingkungan, pendekatan ini menyediakan landasan argumen yang kuat bagi perlunya intervensi regulatif yang diusulkan.

Prosedur pengumpulan data, Upaya pengumpulan informasi dilakukan melalui metode analisis dokumen (*content analysis*) terhadap instrumen akademik primer dan sekunder. Dokumen kurikulum tingkat institut, dokumen prodi, serta sampel Rencana Pembelajaran Semester (RPS) lintas fakultas dikumpulkan untuk diidentifikasi muatan nilai ekologisnya. Peneliti secara sistematis melakukan penelusuran kata kunci terkait ekoteologi dan integrasi ilmu untuk memetakan sejauh mana isu lingkungan telah terinternalisasi dalam materi ajar. Proses ini bertujuan untuk menangkap fakta objektif mengenai kondisi "gap" antara visi besar kampus dengan realitas perangkat pengajaran yang masih bersifat antroposentris.

Metode analisis data yang terkumpul diolah menggunakan teknik analisis isi kualitatif dengan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informasi dari dokumen kurikulum dikategorisasikan berdasarkan tipologi integrasi untuk mendeteksi titik-titik fragmentasi keilmuan yang paling krusial. Selanjutnya, metode analisis kebijakan diterapkan untuk mengevaluasi alternatif solusi melalui kriteria efektivitas dan kelayakan operasional. Analisis ini berfungsi menjawab pertanyaan kebijakan mengenai instrumen regulasi apa yang paling tepat untuk menjamin keberlanjutan integrasi ekoteologi, yang dalam kajian ini bermuara pada rekomendasi Keputusan Rektor atau Keputusan Dekan.

Validitas dan reliabilitas analisis untuk menjamin kualitas hasil kajian, dilakukan triangulasi teori dengan mengonfrontasi temuan data dokumen terhadap kerangka teori integrasi-interkoneksi dan ekoteologi Islam. Validitas internal dijaga melalui proses pengecekan ulang (*member check*) terhadap kesesuaian interpretasi data dengan standar kurikulum nasional yang berlaku bagi PTKI. Selain itu, prosedur audit jejak dilakukan dengan mendokumentasikan setiap tahapan analisis dokumen secara transparan, sehingga pembaca dapat menelusuri dasar pengambilan kesimpulan. Hal ini memastikan bahwa rekomendasi kebijakan yang ditawarkan tidak bersifat subjektif, melainkan didasarkan pada bukti tekstual dan analisis kebutuhan institusional yang dapat dipertanggungjawabkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis dokumen terhadap kurikulum IAIN Pontianak saat ini menunjukkan adanya pola "isolasi akademik" yang cukup mengkhawatirkan antara teks keagamaan dan realitas ekologi. Meskipun visi kampus secara implisit mencita-citakan nilai-nilai kearifan lokal, namun instrumen operasional seperti RPS masih didominasi oleh pembahasan yang bersifat teosentris-langit tanpa pijakan bumi. Sebagian besar mata

kuliah rumpun studi Islam cenderung berhenti pada tataran normatif-dogmatis yang tidak bersentuhan dengan isu degradasi lingkungan di Kalimantan Barat. Kondisi ini membuktikan bahwa fragmentasi epistemologis bukan sekadar wacana teoritis, melainkan kenyataan struktural yang membuat mahasiswa kehilangan orientasi dalam menghadapi krisis iklim. Tanpa jembatan konseptual yang kuat, ajaran agama akan terus dipandang sebagai entitas suci yang terpisah dari urusan pelestarian hutan dan sungai.

Ketiadaan standar integrasi yang baku menyebabkan upaya penyisipan nilai ekologi dalam proses pembelajaran sangat bergantung pada inisiatif personal masing-masing dosen. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa tanpa adanya mandat regulasi, isu lingkungan seringkali dianggap sebagai "materi titipan" yang hanya menjadi suplemen opsional dalam perkuliahan. Ego disiplin yang kuat membuat dosen-dosen di program studi non-sains merasa tidak memiliki otoritas maupun kewajiban moral untuk membahas krisis ekologi di ruang kelas. Akibatnya, mahasiswa hukum syariah atau ekonomi Islam, misalnya, tidak dibekali pemahaman memadai tentang bagaimana disiplin ilmu mereka dapat berkontribusi pada mitigasi bencana lingkungan lokal. Inilah titik lemah yang menyebabkan profil lulusan tidak memiliki sensitivitas ekologis yang tajam meski mereka fasih dalam penguasaan literatur klasik.

Secara strategis, fragmentasi ini mengakibatkan IAIN Pontianak kehilangan peran sebagai pusat keunggulan ekoteologi yang seharusnya menjadi ciri khas kampus di jantung Borneo. Ketimpangan antara literasi teks dan literasi alam ini menciptakan gap kompetensi yang membuat institusi gagal menjawab tuntutan zaman akan pembangunan berkelanjutan. Ketika kurikulum tetap steril dari isu ekologi, kampus secara tidak langsung turut melanggengkan pandangan antroposentrisme yang menempatkan alam hanya sebagai objek eksploitasi manusia. Krisis lingkungan yang terjadi di depan mata, mulai dari kabut asap hingga pencemaran merkuri, seolah tidak mendapatkan respon ijtihad yang memadai dari meja-meja akademik. Oleh sebab itu, perubahan kurikulum bukan lagi pilihan sekunder, melainkan kebutuhan darurat untuk memulihkan martabat intelektual institusi di tengah kehancuran ekosistem.

Evaluasi terhadap alternatif kebijakan menunjukkan bahwa pendekatan persuasif tanpa payung hukum tidak lagi efektif untuk membongkar kebuntuan sistemik di tingkat program studi. Implementasi integrasi ilmu memerlukan intervensi regulatif yang mampu memaksa terjadinya dialog lintas disiplin dalam setiap tahapan penyusunan perangkat pembelajaran. Keputusan Rektor tentang Standar Kurikulum Nexus Ekoteologi merupakan solusi paling rasional untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis bagi para akademisi. Regulasi ini akan bertindak sebagai "mandat integrasi" yang mewajibkan setiap RPS untuk merumuskan keterkaitan substansi mata kuliah dengan tanggung jawab pelestarian alam. Dengan adanya standar operasional yang jelas, proses audit kurikulum oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) akan memiliki indikator yang terukur dan objektif.

Penerapan Nexus Ekoteologi dalam kurikulum akan mengubah pola interaksi mahasiswa dengan ilmu pengetahuan, di mana teks agama tidak lagi dibaca secara beku, tetapi secara hidup. Mahasiswa akan diajak untuk mengeksplorasi makna "khalifah" bukan sebagai penguasa absolut, melainkan sebagai penjaga keseimbangan ekosistem yang rapuh di tanah khatulistiwa. Integrasi ini memberikan nyawa baru bagi mata kuliah tradisional sehingga mampu melahirkan perspektif kritis terhadap praktik perusakan alam yang mengatasnamakan pembangunan. Dengan mengaitkan narasi wahyu dan realitas lingkungan, proses pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan transformatif bagi kehidupan nyata di masyarakat. Langkah ini sekaligus memperkuat

identitas IAIN Pontianak sebagai institusi yang berani melakukan terobosan ijtihad kurikulum demi kemaslahatan publik yang lebih luas.

Pada akhirnya, keberhasilan reorientasi kurikulum ini sangat bergantung pada komitmen politik pimpinan untuk mengawal transisi paradigma ini secara konsisten dan berkelanjutan. Kebijakan ini harus dipandang sebagai investasi peradaban untuk menyelamatkan masa depan generasi mendatang dari ancaman kiamat ekologis yang kian nyata. Jika IAIN Pontianak berhasil melaksanakan mandat Nexus Ekoteologi ini, maka institusi ini akan menjadi pionir bagi perguruan tinggi keagamaan lainnya di Indonesia. Transformasi ini membuktikan bahwa agama Islam memiliki energi pembebasan yang luar biasa untuk melindungi alam semesta dari tangan-tangan jahil manusia. Inilah momentum paling tepat bagi kampus untuk membuktikan bahwa iman dan sains adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam menjaga kelestarian bumi.

Limitasi Kajian

Meskipun kajian ini disusun dengan upaya maksimal untuk memotret realitas kurikulum di IAIN Pontianak, saya menyadari adanya beberapa batasan yang perlu dipahami secara bijak oleh pembaca. Salah satu limitasi utama terletak pada ruang lingkup data yang sangat bergantung pada ketersediaan dokumen formal seperti; matakuliah dan RPS dan kurikulum prodi yang berhasil diakses selama periode penelitian. Ada asumsi dasar yang kami bangun bahwa dokumen tertulis tersebut mencerminkan realitas pengajaran di kelas secara utuh, padahal dalam praktiknya, bisa jadi terdapat improvisasi ekologis dari dosen yang tidak tertuang secara tekstual dalam dokumen kurikulum. Selain itu, cakupan isu kebijakan ini kami batasi secara spesifik pada aspek pendidikan dan pengajaran, sehingga belum menyentuh ranah penelitian dan pengabdian masyarakat secara mendalam, yang sebenarnya juga memiliki porsi besar dalam ekosistem kampus.

Secara metodologis, potensi bias dalam interpretasi data tetap menjadi tantangan, mengingat analisis kualitatif ini melibatkan sudut pandang peneliti dalam memaknai integrasi ekoteologi yang bersifat subjektif. Kendala lain muncul dari dinamika perubahan kebijakan pendidikan tinggi di tingkat nasional yang sering kali sangat cepat, sehingga temuan ini mungkin memerlukan penyesuaian jika terjadi perombakan standar kurikulum secara masif dari pusat. Batasan ini juga memengaruhi generalisasi temuan; artinya, solusi "Nexus Ekoteologi" yang kami tawarkan sangat kental dengan konteks lokal Kalimantan Barat dan karakteristik IAIN Pontianak, sehingga belum tentu dapat diterapkan secara identik di institusi lain dengan lanskap sosiologis yang berbeda. Namun, keterbatasan ini justru membuka ruang bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakrawala kajian ini di masa depan.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan utama dari kajian ini terletak pada keberaniannya menggeser wacana integrasi ilmu dari sekadar perdebatan filosofis di ruang seminar menjadi sebuah instrumen kebijakan yang sangat praktis dan operatif. Jika penelitian-penelitian sebelumnya tentang ekoteologi di Indonesia lebih banyak berkutat pada penggalian norma-norma abstrak dalam teks suci, kajian ini melangkah lebih jauh dengan merumuskan konsep "**Nexus Ekoteologi**" sebagai standar legal-formal dalam kurikulum perguruan tinggi. Kontribusi unik ini menawarkan metodologi integrasi yang terukur melalui intervensi matakuliah, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), di mana isu-isu krusial seperti

degradasi lahan dan krisis iklim di Kalimantan Barat diposisikan bukan sebagai materi tempelan, melainkan sebagai ruh dari setiap disiplin ilmu agama. Dengan menyatukan analisis kebijakan William N. Dunn dan paradigma interkoneksi M. Amin Abdullah, artikel ini menyajikan sebuah sintesis informasi yang komprehensif untuk memecah kebuntuan "ego-sektoral" akademik yang selama ini menghambat peran institusi keagamaan dalam pelestarian alam.

Secara empiris, kajian ini memberikan nilai tambah yang signifikan dengan mengungkap fakta-fakta spesifik mengenai "gap" administratif yang menyebabkan gagalnya internalisasi nilai lingkungan di tingkat program studi. Temuan mengenai ketiadaan mandat regulasi sebagai akar masalah fragmentasi keilmuan di IAIN Pontianak merupakan kontribusi orisinal yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur manajemen pendidikan tinggi Islam. Kajian ini tidak hanya berhenti pada kritik, tetapi juga menyumbangkan alternatif kebijakan yang lebih progresif melalui usulan Keputusan Rektor sebagai payung hukum wajib. Signifikansi artikel ini terletak pada kemampuannya memberikan arah baru bagi pembuatan kebijakan publik di kampus, di mana kurikulum ditransformasikan menjadi alat perjuangan ekologis yang nyata. Dengan demikian, karya ini tidak hanya memajukan diskursus akademik mengenai Islam dan alam, tetapi juga memberikan cetak biru (blueprint) praktis bagi institusi pendidikan lainnya yang ingin melakukan reorientasi kebijakan berbasis keberlanjutan lingkungan di era krisis iklim global.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berikut ini beberapa alternatif kebijakan yang potensial untuk menyelesaikan isu dan masalah sebagaimana tersebut diatas.

Alternatif 1: Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan *Team Teaching* Lintas Disiplin.

Regulasi ini mewajibkan mata kuliah inti didekati secara kolaboratif. Misalnya, dosen Fiqh harus mengajar bersama dosen yang memahami analisis lingkungan dalam satu ruang kelas. Kebijakan ini secara fisik memaksa dosen keluar dari isolasi spesialisasinya dan menciptakan dialog intelektual langsung di hadapan mahasiswa.

Alternatif 2: Keputusan Rektor tentang Standar Kurikulum Berbasis Nexus Ekoteologi

Regulasi ini menetapkan standar penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mewajibkan adanya "Titik Temu" (Nexus) antara kompetensi prodi dengan isu ekologi. Setiap prodi wajib memetakan bagaimana ilmu mereka (misal: Hukum, Ekonomi, atau Komunikasi) berkontribusi pada pelestarian alam, sehingga isu lingkungan menjadi benang merah di seluruh fakultas

Alternatif 3: Peraturan Rektor tentang Skema Insentif Riset dan Publikasi Kolaboratif

Regulasi ini mengatur ulang sistem hibah riset internal (BOPTN/PNBP). Insentif finansial dan slot publikasi jurnal institusi diprioritaskan bagi tim peneliti yang beranggotakan dosen lintas fakultas. Ini menciptakan motivasi ekonomi dan akademik bagi dosen untuk meruntuhkan tembok spesialisasi demi mencapai prestasi kolektif.

Alternatif 4: Peraturan Rektor tentang Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Berbasis Integrasi Ilmu

Sebagai pengganti workshop, regulasi ini memasukkan poin "Integrasi

Keilmuan dan Kontribusi Ekologi" ke dalam sistem penilaian kinerja dosen tahunan (Beban Kerja Dosen/BKD versi internal). Dosen yang tidak mampu menunjukkan bukti integrasi (seperti membuat modul ajar lintas ilmu atau pengabdian masyarakat bertema ekologi) akan mendapatkan skor kinerja yang lebih rendah. Ini adalah regulasi terkuat karena menghubungkan langsung perilaku akademik dosen dengan aspek administratif dan karier mereka.

Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Berdasarkan alternatif-alternatif kebijakan di atas, maka perlu dilakukan analisis menggunakan teori William N. Dunn untuk menentukan skor terhadap alternatif kebijakan di atas untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Analisis dan Skoring Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas (1-5)	Kelayakan (1-5)	Dampak (1-5)	Total Skor
1	Peraturan Rektor tentang <i>Team Teaching</i> Lintas Disiplin	5	3	5	13
2	Keputusan Rektor tentang Standar Kurikulum Nexus Ekoteologi	5	4	5	14
3	Peraturan Rektor tentang Insentif Riset Kolaboratif	4	4	3	11
4	Peraturan Rektor tentang Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	4	3	5	12

Berdasarkan analisis skoring ini, Alternatif Kebijakan nomor 2 (Keputusan Rektor tentang Standar Kurikulum *Nexus Ekoteologi*) mendapatkan total skor tertinggi. Berdasarkan hasil analisis komprehensif menggunakan kriteria skoring William N. Dunn, ditemukan bahwa Alternatif Kebijakan Nomor 2 (Keputusan Rektor tentang Standar Kurikulum *Nexus Ekoteologi*) unggul secara signifikan dibandingkan alternatif lainnya. Kebijakan ini meraih skor tertinggi karena mampu memenuhi parameter efektivitas dalam memutus rantai fragmentasi epistemologis secara sistemik, sekaligus memiliki tingkat kelayakan administratif yang paling realistis untuk diterapkan di IAIN Pontianak. Berbeda dengan pendekatan persuasif yang cenderung lambat, intervensi melalui Keputusan Rektor memberikan kepastian hukum dan mandat operasional yang kuat bagi setiap program studi untuk segera mengintegrasikan nilai ekologi dalam perangkat pembelajaran.

Keunggulan alternatif ini juga terlihat dari sisi efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan mendesak masyarakat di Kalimantan Barat yang tengah menghadapi krisis lingkungan. Dengan menetapkan standar kurikulum yang baku, institusi tidak lagi terjebak dalam perdebatan wacana yang berlarut-larut, melainkan langsung bergerak pada aksi nyata transformasi akademik. Skor tinggi ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merupakan solusi paling strategis untuk mengubah wajah pendidikan Islam di IAIN Pontianak menjadi lebih membumi dan relevan. Oleh karena itu, penetapan Keputusan Rektor ini menjadi rekomendasi tunggal yang paling otoritatif untuk segera dieksekusi guna menjamin keberlanjutan visi ekoteologi kampus di masa depan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Seluruh rangkaian analisis ini menegaskan bahwa fragmentasi epistemologis di IAIN Pontianak hanya dapat diputus melalui keberanian regulasi dalam bentuk Keputusan Rektor tentang Standar Kurikulum Nexus Ekoteologi. Kebijakan ini bukan sekadar perubahan dokumen, melainkan upaya radikal untuk menyatukan kembali teks suci dengan realitas alam, yang secara strategis memajukan praktik pendidikan Islam inklusif di jantung Kalimantan Barat. Temuan ini memberikan kontribusi nyata bagi teori kebijakan integratif dengan membuktikan bahwa mandat hukum adalah kunci dalam mentransformasikan gagasan filosofis menjadi aksi pelestarian lingkungan yang sistemik. Meskipun kajian ini terbatas pada analisis kurikulum tingkat institut, implikasinya mendesak institusi untuk segera bergerak dari menara gading menuju tanggung jawab ekologis yang nyata. Kedepannya, agenda kebijakan harus diperluas pada penguatan literasi dosen dan pengabdian masyarakat guna memastikan ekosistem akademik benar-benar menjadi garda terdepan penyelamat bumi.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis atas beberapa alternatif kebijakan yang telah dikemukakan, maka hasil kajian ini pada akhirnya merekomendasikan kepada Rektor IAIN Pontianak untuk membuat regulasi dalam bentuk Keputusan Rektor tentang Standar Kurikulum Nexus Ekoteologi yang mengintegrasikan muatan aspek ekologi ke dalam instrumen kurikulum. Penerapan Keputusan Rektor yang dijalan secara kolaboratif yang melibatkan dosen, mahasiswa dan lapisan birokrasi akademik lainnya menjadi jawaban utama atas *problem statement* dalam *policy paper* ini yakni tidak terjadinya fragmentasi epistemologis dalam Kurikulum Pendidikan dan Pengajaran di IAIN Pontianak di masa mendatang.

REFERENSI

- BPK RI. (2024). Penambangan WNA Cina di Kalimantan Barat Rugikan Indonesia Lebih dari Rp900 Miliar. <https://kalbar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/10/02-Juli-2-WNA.pdf>
- Hannani, et. a. (2025). Kurikulum Cinta Menyulam Harmoni di Kampus Akulturasi. In e-book (1st ed., p. 645). <https://doi.org/->
- Ismail, A. (2023). Lingkungan Hidup dalam Perspektif Agama-Agama (1st ed.). Fataw Publishing. [https://repository.unika.ac.id/34825/1/Buku Lingkungan Hidup Dalam perspektif Agama-Agama 1.pdf](https://repository.unika.ac.id/34825/1/Buku_Lingkungan_Hidup_Dalam_perspektif_Agama-Agama_1.pdf)
- Jannah, F. M. (2025). Filsafat Ekologi dan Antropocentrisme dalam Krisis Iklim : Menggali Peran Manusia dalam Menghadapi Krisis Lingkungan Global. Al-Afham, 2(1), 75–90. <https://doi.org/https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.1001/jama.2016.9797?domain=https://jurnal.stikkendal.ac.id>
- Maimun. (2025). Paradigma Ekoteologis dalam Pembentukan Fiqh Ramah Lingkungan. YNAM, 1(2), 97–105. <https://doi.org/->
- Mudin, M. I. (2025). PARADIGMA DOMINASI VIS AS VIS ATAS ALAM : STUDI KRITIS PERSPEKTIF TEO- EKOLOGI ISLAM. AJIPP, 6(1), 91–125.

<https://doi.org/https://doi.org/10.22515/ajipp.v5i1.8826>

- Musyafa, W., Pratama, R. A., Khotimah, S., Amriyah, C., & Mustofa, I. (2025). PENGUATAN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI ISLAM DI. *Pendas*, 10(04), 477–489. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.34897>
- Najihah, Bannan, E. a. (2025). *Ekoteologi Islam Konsepsi dan Implementasi* (2nd ed.). Kementerian A.
- Nurhalim, S. (2025). Mengapa Kalimantan Disebut Paru-Paru Dunia? *Detik.Com*. <https://www.detik.com/kalimantan/kalimantan-lestari/d-7833640/mengapa-kalimantan-disebut-paru-paru-dunia>
- Redaksi Suarakalbar. (2025). Akademisi Untan: Kalbar Kehilangan 61 Persen Hutan dalam Dua Dekade, Deforestasi Ancam Fondasi Kehidupan. *Webpage Suarakalbar.Co.Id*. <https://www.suarakalbar.co.id/2025/08/akademisi-untan-kalbar-kehilangan-61-persen-hutan-dalam-dua-dekade-deforestasi-ancam-fondasi-kehidupan/>
- Sadiyah, S. S. (2026). Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Ekologi. *Paedagogie*, 21(1), 1–10. <https://doi.org/10.31603/paedagogie.v21i1.15492>
- Sukarsono. (2014). *Ekologi Islam* (Sukarsono (ed.); 2nd ed.). UMM Press. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11285/1/Sukarsono - Ekologi Islam.pdf>
- Teti, M. (2025). Meningkatkan Kesadaran Moral Ekologis melalui Aktivitas Harian Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar. *Jupendir*, 2(3), 96–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jupendir.v2i3.561>
- Webpage UIN Khas. (2025). *Webpage UINKHAS - Wakil Rektor I UIN KHAS Jember Buka Forum Inseri Ekoteologi dalam Kurikulum OBE Berbasis Cinta*. *Webpage UINKHAS*. <https://uinkhas.ac.id/berita/detail/wakil-rektor-i-uin-khas-jember-buka-forum-insersi-ekoteologi-dalam-kurikulum-obe-berbasis-cinta>
- Dokumen Kurikulum OBE (Outcomes Based Education) Program Studi yang berlaku di IAIN Pontianak Tahun 2025
- Dokumen SK Rektor IAIN Pontianak No. 237 Tahun 2022, SK Rektor No. 438 Tahun 2023 dan SK Rektor No. 459 Tentang Penerima Bantuan Penelitian Penerima Bantuan Kegiatan Penelitian BOPTN pada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- SK Rektor IAIN Pontianak Tahun 2024 Tentang Penerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset
- Abdullah, M. A. (2014). The integration of science and religion in the 21st century: The Indonesian experience. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 52(1), 247-263. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.247-263>
- Huda, M., et al. (2020). Enacting Sustainable Development Goals (SDGs) in Islamic Education: Evidence from Indonesia. *Sustainability*, 12(10), 4235. <https://doi.org/10.3390/su12104235>
- Mangunjaya, F. M., & McKay, J. E. (2012). Reviving an Islamic approach for environmental conservation in Indonesia. *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology*, 16(3), 286-305. <https://doi.org/10.1163/15685357-01603006>

